

Desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kinerja penyerapan belanja daerah di Indonesia

Tomi Setiawan^{1*}, Muhammad Farras Samith², Muhammad Hammam Mughits³, Shifwah Murran Nashifa⁴

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

⁴Institute for Agrarian Policy and Development Studies, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: tomi.setiawan@unpad.ac.id)

Abstract

This study examines the effect of fiscal decentralization on regional budget absorption performance in Indonesia, using panel data from 34 provinces for 2021–2023. The analysis method employed is fractional probit regression with the Mundlak approach, along with a robustness test using Quasi Maximum Likelihood Estimation (QMLE). The results indicate that fiscal decentralization, both in revenue and expenditure, has a positive, statistically significant impact on the probability of regional budget absorption. Regions with higher fiscal autonomy and higher expenditure-to-revenue ratios tend to exhibit better budget absorption performance. In addition, fiscal independence also contributes positively to expenditure absorption. Simultaneously, several control variables, such as population growth, show a positive effect, while others, including the unemployment rate, GRDP per capita, and population density, have a significant negative impact. These findings emphasize the importance of strengthening local fiscal capacity and regional institutional quality to improve budget management effectiveness and ensure the successful implementation of fiscal decentralization.

Keywords: Fiscal Decentralization, Regional Expenditure Absorption, Fractional Probit Regression, QMLE.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja penyerapan belanja daerah di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 34 provinsi selama periode 2021–2023. Metode analisis yang digunakan adalah fractional probit regression dengan pendekatan Mundlak, serta uji ketahanan menggunakan Quasi Maximum Likelihood Estimation (QMLE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas penyerapan anggaran daerah. Daerah dengan tingkat otonomi fiskal yang lebih tinggi dan rasio belanja terhadap pendapatan yang lebih besar cenderung memiliki kinerja penyerapan anggaran yang lebih baik. Selain itu, kemandirian fiskal juga berkontribusi positif terhadap serapan belanja, sementara beberapa variabel kontrol seperti pertumbuhan penduduk menunjukkan pengaruh positif, dan variabel seperti tingkat pengangguran, PDRB per kapita, serta kepadatan penduduk justru berdampak negatif signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas fiskal lokal dan kualitas kelembagaan daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan mendorong keberhasilan desentralisasi fiskal secara merata.

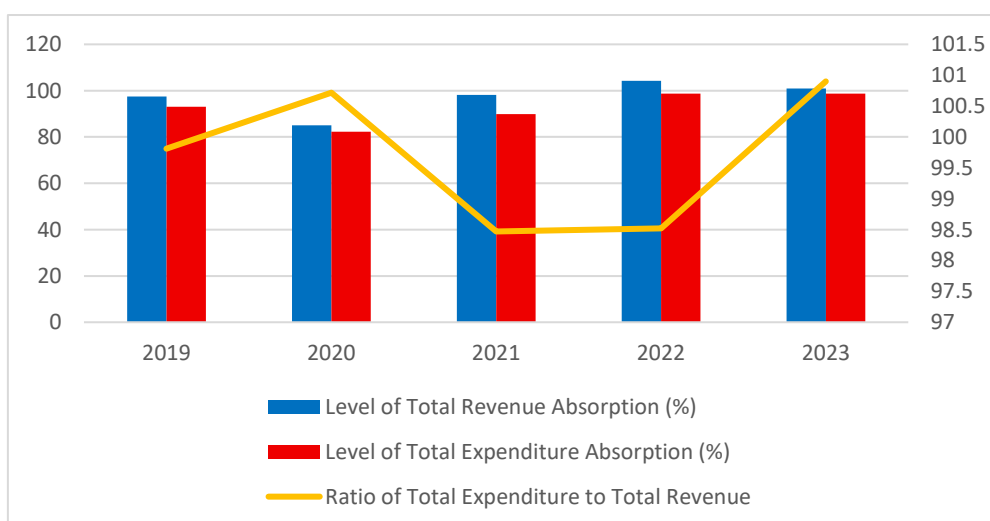
Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Penyerapan Belanja Daerah, Fractional Probit Regression, QMLE.

How to cite: Setiawan, T., Samith, M. F., Mughits, M. H., & Nashifa, S. M. (2026). Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penyerapan Belanja Daerah di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(1), 177–196. <https://doi.org/10.53088/jerps.v6i1.3015>



1. Pendahuluan

Sejak era reformasi, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai bagian dari reformasi tata kelola daerah. Desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, dan mempersempit kesenjangan antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Dalam praktiknya, desentralisasi fiskal memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka, termasuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan lokal (Dharmawati et al., 2024). Namun, pertanyaan mendasar tetap ada mengenai bagaimana desentralisasi fiskal memengaruhi kinerja penyerapan pengeluaran daerah. Di satu sisi, desentralisasi diyakini dapat meningkatkan responsivitas anggaran terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, potensi persaingan fiskal antar daerah juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan anggaran, termasuk kemungkinan penyerapan anggaran yang rendah karena kapasitas kelembagaan yang lemah atau perencanaan yang kurang optimal (Liu et al., 2016).



Gambar 1. Performa Penyerapan Belanja dan Penerimaan Daerah
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Gambar 1 mengilustrasikan tren penyerapan pendapatan dan pengeluaran daerah di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Tingkat penyerapan pendapatan cenderung tinggi dan stabil, bahkan melebihi 100 persen pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan pendapatan yang dianggarkan. Sebaliknya, penyerapan pengeluaran lebih fluktuatif dan secara konsisten di bawah penyerapan pendapatan, dengan titik terendah pada tahun 2020, kemungkinan karena gangguan pandemi. Rasio pengeluaran terhadap pendapatan juga menunjukkan pola yang tidak stabil, dengan nilai di atas 100 persen pada tahun 2020 dan 2023, menunjukkan defisit anggaran.

Fenomena ini semakin menggarisbawahi pentingnya meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja penyerapan belanja daerah. Meskipun daerah memiliki kewenangan fiskal yang lebih besar, pemerintah daerah belum tentu mampu menyerap anggaran secara optimal, yang menunjukkan bahwa otonomi fiskal saja

tidak cukup tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai (Zhao & He, 2024). Hal ini relevan dengan pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran publik di tingkat daerah. Efektivitas desentralisasi fiskal dalam mendorong peningkatan kualitas belanja daerah masih menjadi bahan perdebatan. Penyerapan anggaran yang rendah seringkali mencerminkan implementasi program daerah yang suboptimal dan berisiko mengurangi manfaat keseluruhan dari kebijakan fiskal (Lenas et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah peningkatan otonomi fiskal berkontribusi pada peningkatan kinerja penyerapan anggaran.

Sebagian besar literatur tentang desentralisasi fiskal di Indonesia terus berfokus pada hubungan antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi, layanan publik, atau kapasitas fiskal daerah (Huda & Sasana, 2013; Meinarsari & Nursadi, 2022; Saputra et al., 2012). Sementara itu, studi yang secara khusus menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja penyerapan pengeluaran masih sangat terbatas. Studi Park di Korea Selatan, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan dapat menyebabkan pergeseran struktur pengeluaran (K. Park, 2023). Namun, belum ada penelitian serupa terutama di Indonesia yang meneliti bagaimana desentralisasi memengaruhi aspek penyerapan. Kapasitas di Indonesia, negara dengan struktur fiskal yang beragam dan kesenjangan kapasitas daerah (Mahi et al., 2019).

Fokus yang sempit ini menyisakan pertanyaan penting mengenai efektivitas output fiskal di tingkat daerah. Desentralisasi fiskal telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran mereka, termasuk pengeluaran daerah. Namun, penyerapan pengeluaran yang rendah atau penumpukan pengeluaran di akhir tahun fiskal (masalah klasik dalam manajemen keuangan daerah di Indonesia) sering terjadi. Fenomena ini, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa studi, menunjukkan tantangan dalam kapasitas manajemen dan implementasi anggaran di daerah (Pyun & Rhee, 2015). Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada hubungan antara tingkat desentralisasi fiskal dan efisiensi penyerapan pengeluaran, sebagai proksi untuk kapasitas penyerapan anggaran, akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif (Cho & Lee, 2024).

Misalnya, beberapa temuan menunjukkan bahwa terdapat masalah terkait volatilitas pengeluaran pemerintah daerah riil yang berasal dari ketidakpastian transfer pemerintah pusat, meskipun desentralisasi fiskal yang lebih tinggi yang ditandai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan Asli Daerah) cenderung mengurangi volatilitas pengeluaran ini (Furceri, 2007). Hal ini menyiratkan bahwa sumber pendapatan yang lebih stabil dan terkontrol oleh daerah dapat memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran. Namun, penelitian ini belum secara langsung menguji bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi kecepatan atau kualitas penyerapan pengeluaran (Richard et al., 2017).

Dengan keragaman fiskal dan kapasitas regional yang ekstrem di Indonesia, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dibandingkan daerah yang sangat

bergantung pada Dana Transfer Pusat (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), desentralisasi fiskal dapat menghasilkan dampak yang berbeda pada kapasitas penyerapan. Kapasitas regional. Daerah dengan tingkat desentralisasi fiskal (Pendapatan Asli Daerah) yang tinggi mungkin memiliki insentif dan kapasitas yang lebih baik untuk penyerapan pengeluaran yang efisien karena dana tersebut berasal dari sumber mereka sendiri (Siagian et al., 2024). Sebaliknya, daerah yang sangat bergantung pada Dana Transfer mungkin menghadapi kendala dalam penyerapan karena kompleksitas aturan transfer dan kapasitas administrasi yang terbatas. Dengan demikian, kesenjangan penelitian mengenai kapasitas penyerapan sangat relevan untuk merumuskan kebijakan transfer dan pengeluaran daerah yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal (Kurniawan & Farhan, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama tentang bagaimana desentralisasi fiskal memengaruhi kinerja penyerapan belanja daerah di Indonesia. Dengan fokus ini, studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi empiris dalam memahami dinamika efektivitas fiskal di era otonomi daerah, dan untuk memberikan masukan kebijakan yang lebih kontekstual guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Penelitian ini berguna untuk para pemangku kebijakan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya memberikan otonomi, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas belanja publik dan pembangunan yang inklusif.

2. Tinjauan Pustaka

Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Sebagian besar literatur tentang desentralisasi fiskal di Indonesia terus berfokus pada hubungan antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, atau kapasitas fiskal daerah. Reformasi desentralisasi fiskal terbaru di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), lebih lanjut menggarisbawahi perlunya mengkaji efektivitas fiskal daerah. Hubungan Keuangan antara Undang-Undang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengeluaran dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, studi-studi yang secara khusus menganalisis dampak desentralisasi fiskal, khususnya dalam Hubungan yang baru Keuangan antara Kerangka hukum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengenai kinerja penyerapan pengeluaran, masih sangat terbatas. Reformasi desentralisasi merupakan respons terhadap kebijakan fiskal terpusat pemerintah Orde Baru, yang sangat bergantung pada pendapatan minyak dan kontrol terpusat atas keuangan daerah. Krisis ekonomi dan jatuhnya rezim Orde Baru menuntut pergeseran ke arah pengaturan fiskal yang lebih terdesentralisasi (Pal & Wahhaj, 2014).

Terlepas dari perubahan legislatif, pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai otonomi fiskal. Sebagian besar pendapatan

mereka berasal dari transfer antar pemerintah, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, bukan dari sumber yang dihasilkan secara lokal. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah telah mencakup pengenalan pajak daerah dan pungutan pengguna (Widodo et al., 2024). Namun, langkah-langkah ini hanya sedikit meningkatkan proporsi pendapatan yang dikumpulkan di tingkat daerah, menunjukkan ketergantungan yang berkelanjutan pada transfer pemerintah pusat (Subhan et al., 2024).

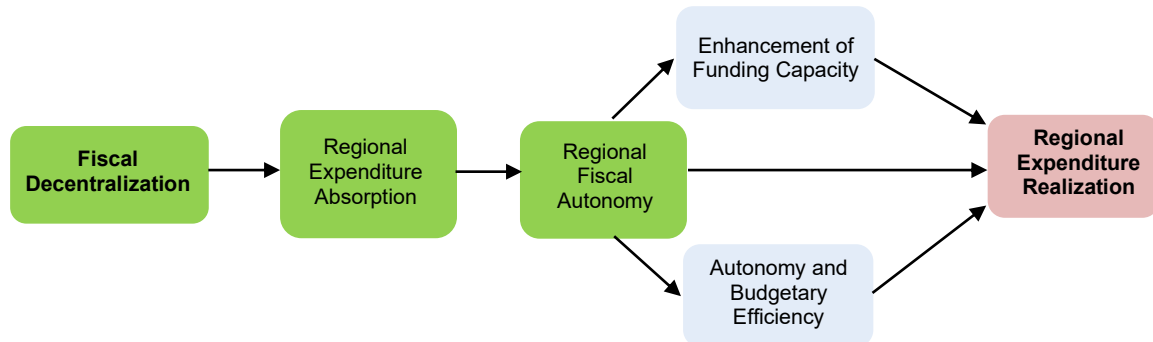
Desentralisasi fiskal telah menyebabkan peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur sosial, seperti kesehatan dan pendidikan, terutama di masyarakat dengan tradisi demokrasi lokal yang kuat. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok dalam pengeluaran untuk infrastruktur fisik, seperti transportasi dan komunikasi, di berbagai komunitas (Seifert & Li, 2015). Reformasi desentralisasi juga telah memengaruhi sistem politik dan administrasi, mengubah mekanisme akuntabilitas antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun pemerintah daerah telah memperoleh lebih banyak tanggung jawab untuk penyediaan barang publik, mereka tetap bergantung pada transfer pusat untuk pembiayaan (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Di Indonesia, desentralisasi fiskal merupakan pergeseran kebijakan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Diimplementasikan pada tahun 2001, kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kendali yang lebih besar atas keuangan dan prioritas pembangunan mereka. Kebijakan ini memiliki dampak yang bervariasi di berbagai daerah, memengaruhi kemandirian keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial (Pal & Wahhaj, 2014). Desentralisasi fiskal telah memberdayakan daerah dengan potensi ekonomi yang kuat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga mendukung pembangunan daerah dan kemandirian keuangan (Chandra, 2024). Daerah dengan sumber daya alam yang melimpah telah memperoleh manfaat yang signifikan, karena mereka dapat memanfaatkan aset-aset ini untuk meningkatkan otonomi keuangan mereka (Setiawan & Samith, 2025). Namun, kesenjangan muncul karena daerah yang lebih kaya mengelola keuangan mereka secara lebih mandiri, sementara daerah yang lebih miskin tetap bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal telah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi positif di berbagai wilayah Indonesia (Sofilda et al., 2023). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan moneter mereka dengan kebutuhan lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dengan memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan mereka dan meningkatkan layanan publik. Namun, tingkat desentralisasi dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan jika tidak dikelola dengan baik, seperti yang terlihat di daerah dengan kemandirian fiskal kurang dari 50 persen (Sofiani et al., 2024).

Desentralisasi Penyerapan Pengeluaran Regional

Desentralisasi fiskal berdampak positif pada kesejahteraan sosial dengan meningkatkan belanja modal dan memperbaiki layanan publik (Reba, 2024). Pemerintah daerah, yang lebih dekat dengan konstituennya, dapat lebih memahami dan mengatasi kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik. Namun, efektivitas peningkatan ini bergantung pada kapasitas manajerial pemerintah daerah dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien (Ewing-Chow & Losari, 2015).



Gambar 2. Kerangka Konseptual Hubungan antara Desentralisasi Fiskal, Otonomi Fiskal, dan Realisasi Pengeluaran Regional

Sumber: Diadaptasi dari Oates (1972), Martinez-Vazquez & McNab (2003), Bird & Vaillancourt (1998).

Kerangka konseptual pada Gambar 2 mengilustrasikan bagaimana desentralisasi fiskal berkontribusi pada peningkatan realisasi pengeluaran daerah melalui mekanisme yang meningkatkan otonomi fiskal dan kapasitas pembiayaan lokal. Mendelegasikan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, karena mereka memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat mereka. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal mendorong peningkatan penyerapan pengeluaran daerah, memungkinkan pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menetapkan prioritas anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal (Reba, 2024; Liu et al., 2016).

Lebih lanjut, desentralisasi yang efektif memperkuat kemandirian fiskal daerah, ditandai dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri melalui pajak, pungutan, dan sumber pendapatan lokal lainnya (Dharmawati et al., 2024; Widodo et al., 2024). Kondisi ini secara bersamaan meningkatkan kapasitas pembiayaan (Bird & Vaillancourt, 1998) dan efisiensi penganggaran (Dharmawati et al., 2024), karena daerah yang lebih mandiri secara fiskal cenderung lebih akuntabel dan selektif dalam penggunaan dana publik. Pada akhirnya, kombinasi antara kapasitas pembiayaan yang kuat dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran menghasilkan pengeluaran daerah yang lebih optimal, yang merupakan indikator kunci keberhasilan desentralisasi fiskal (Martinez-Vazquez & McNab, 2003; Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Proses ini melibatkan pengalihan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota (Hayati et al., 2024). Desentralisasi di Indonesia melibatkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan pemerintah daerah, memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestik berdasarkan inisiatif lokal (Siburian, 2020). Terlepas dari langkah-langkah ini, banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat, yang memengaruhi otonomi keuangan dan kapasitas mereka untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal (Shah, 2023). Desentralisasi telah dikaitkan dengan peningkatan demokrasi di Indonesia, karena meningkatkan partisipasi politik, memberdayakan pemerintahan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah daerah kini bertanggung jawab kepada konstituennya, bukan kepada pemerintah pusat, sehingga mendorong struktur pemerintahan yang lebih demokratis (Boadway & Shah, 2009).

Desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal, merupakan pendekatan kebijakan penting yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi regional dengan memberikan pemerintah daerah kendali yang lebih besar atas pendapatan dan pengeluaran mereka (Hasanli, 2017). Desentralisasi fiskal umumnya dikaitkan dengan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Studi menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah memiliki otonomi fiskal yang lebih besar dan menerima transfer keuangan yang substansial dari pemerintah pusat, kinerja ekonomi regional meningkat (Malik & Aisyah, 2024).

Desentralisasi pengeluaran melalui pendapatan dan transfer regional berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, meskipun pengeluaran modal regional berdampak negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi dapat meningkatkan pertumbuhan, komposisi pengeluaran sangat penting untuk efektivitasnya (Subhan et al., 2024). Desentralisasi dapat mengurangi kesenjangan regional dengan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan layanan publik dengan kebutuhan spesifik mereka, sehingga meningkatkan efisiensi investasi publik. Namun, dampaknya terhadap penyerapan pengeluaran bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan kemampuan tata kelola regional (Sasana, 2019).

Lebih lanjut, konsentrasi pengeluaran regional dapat berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan berkorelasi positif dengan ketidaksetaraan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi dapat memberdayakan daerah, hal itu juga dapat memperburuk ketidaksetaraan yang ada jika tidak dikelola secara efektif (Pandoyo, 2024). Efisiensi investasi publik di bawah desentralisasi bergantung pada kepekaan pemerintah daerah terhadap kebutuhan lokal. Desentralisasi mengarah pada investasi infrastruktur yang lebih responsif, selaras dengan output regional dan kebutuhan masyarakat. Namun, efektivitas desentralisasi fiskal dalam meningkatkan penyerapan pengeluaran tidak seragam di seluruh wilayah (Telaumbanua & Sirojuzilam, 2023).

3. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia untuk periode 2021-2023, yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Data diambil pada periode dan skala provinsi disesuaikan dengan ketersediaan data dan untuk penyesuaian konteks desentralisasi dalam konteks provinsi. Variabel dependennya adalah belanja daerah yang terealisasi (EXP), bersama dengan dua variabel independen utama yang mewakili desentralisasi fiskal: Desentralisasi Pendapatan, Desentralisasi Pengeluaran, Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal, dan Desentralisasi Pajak. Selain itu, beberapa variabel kontrol, termasuk rasio independensi fiskal, penerimaan pajak, indeks demokrasi, populasi, dan ekonomi daerah, juga digunakan untuk memperkuat model. Penjelasan lebih rinci tentang definisi dan sumber data untuk setiap variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Variabel

Variabel	Variabel	Deskripsi	Sumber
Variabel Dependen	Belanja	Realisasi Belanja Daerah	BPS
Variabel Independen	Derajat Desentralisasi	Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah	BPS
	Rasio Belanja terhadap Pendapatan	Rasio Belanja Terhadap Pendapatan	BPS
	Rasio Kemandirian	Rasio Kemandirian	BPS
	Rasio Penerimaan Pajak	Rasio Penerimaan Pajak	BPS
Variabel Kontrol	IDI	Indeks Demokrasi	BPS
	POPGROWTH	Pertumbuhan Penduduk	BPS
	Unemp	Tingkat Pengangguran	BPS
	IPDRBK	PDRB per Kapita	BPS
	IUSAHA	Jumlah Unit Usaha	BPS
	IPOPDEN	Kepadatan Penduduk	BPS

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Dalam model ini, penyerapan belanja daerah ($EXP_{i,t}$) dijelaskan oleh beberapa variabel. Model dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh desentralisasi terhadap penyerapan belanja daerah adalah (J. Park, 2022) sebagai berikut:

$$EXP_{i,t} = G(\beta_0 + \beta_1 Dec_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + \alpha_i + \theta_t + \varepsilon_{i,t})$$

Variabel penjelas utama adalah desentralisasi ($Dec_{i,t}$), yang diukur melalui beberapa indikator seperti desentralisasi pendapatan, pengeluaran, pajak, dan ketidakseimbangan fiskal. Selain itu, model ini juga mencakup $X_{i,t}$ serangkaian variabel kontrol untuk memperhitungkan faktor-faktor lain, termasuk Indeks Demokrasi, pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, PDB per kapita, jumlah unit usaha, dan kepadatan penduduk.

Sebagai langkah pertama dalam analisis empiris, penelitian ini menggunakan regresi probit fraksional dengan model Mundlak karena variabel dependen yang dianalisis bersifat fraksional (dengan nilai antara 0 dan 1). Model Mundlak adalah model *fixed effect* dalam *fractional probit regression*. Penelitian ini juga menggunakan metode *Quasi-Regression*. *Quasi Maximum Likelihood Estimation* (QMLE), yang

merupakan model gabungan *fractional probit regression*, digunakan untuk menilai kekokohan model.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Tabel 2 menunjukkan statistik untuk variabel fiskal utama dalam penelitian ini dengan total 102 observasi. Variabel Pengeluaran memiliki nilai rata-rata 0,938 dengan standar deviasi 0,107, menunjukkan tingkat pengeluaran yang relatif tinggi dan kecenderungan homogenitas antar wilayah. Desentralisasi Pendapatan memiliki nilai rata-rata 41,86 dengan standar deviasi 16,12, mencerminkan variasi yang cukup besar dalam kemampuan wilayah untuk mengelola sumber pendapatan mereka.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Stdev	Min	Max
Penyerapan Belanja	102	0,938	0,107	0,0302	1
Derajat Desentralisasi	102	41,86	16,12	6,610	73,55
Rasio Belanja Terhadap Pendapatan	102	103,0	7,785	88,17	134,8
Rasio Kemandirian	102	89,69	64,91	7,070	329,7
Rasio Penerimaan Pajak	102	32,88	15,20	2,510	69,78
IDI	102	77,08	4,966	62,93	85,62
Pertumbuhan Penduduk	102	1,397	0,466	0,380	3,480
Unemp	102	5,024	1,645	2,270	9,910
IPDRBK	102	10,56	0,546	9,479	12,17
IUSAHA	102	10,98	1,171	8,586	13,79
IPOPDEN	102	4,972	1,532	2,197	9,690

Sumber: Diolah (2025)

Sementara itu, Desentralisasi Pengeluaran menunjukkan nilai rata-rata 103,0 dengan rentang nilai yang cukup lebar, menunjukkan perbedaan kewenangan pengeluaran antar daerah. Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal memiliki rata-rata 89,69 dan deviasi standar yang relatif tinggi (64,91), menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Terakhir, Desentralisasi Pajak memiliki nilai rata-rata 32,88 dengan deviasi standar 15,20, menunjukkan perbedaan kapasitas pengumpulan pajak antar daerah. Secara keseluruhan, statistik deskriptif ini menunjukkan heterogenitas fiskal yang cukup untuk mendukung analisis empiris lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 3, tingkat desentralisasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan probabilitas penyerapan pengeluaran daerah. Pada model pertama, peningkatan satu unit pada indeks desentralisasi meningkatkan kemungkinan penyerapan pengeluaran sebesar 0,149 poin persentase. Pada model kedua, peningkatannya adalah 0,0797 poin persentase. Kedua temuan tersebut signifikan secara statistik pada tingkat 1% dan 5%, masing-masing. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar kewenangan fiskal suatu daerah, semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut menyerap anggaran, yang mengindikasikan efektivitas kebijakan desentralisasi dalam mendorong pemanfaatan anggaran yang optimal.

Tabel 3. Fractional Probit Mundlak Model

Penyerapan Belanja	Coefficient	Marginal Effect	Coefficient	Marginal Effect
Derajat Desentralisasi	0,0129 (0,00496)	0,00149*** (0,000551)		
Rasio Kemandirian			0,00803 (0,00418)	0,000797** (0,000384)
Rasio Penerimaan Pajak			-0,0173 (0,0160)	-0,00171 (0,00154)
Rasio Belanja Terhadap Pendapatan			0,0357 (0,00478)	0,00354*** (0,000510)
IDI	-0,00790 (0,0152)	-0,000910 (0,00174)	0,0309 (0,0251)	0,00307 (0,00233)
IPOPDEN	-0,107 (0,0347)	-0,0123*** (0,00411)	-0,0843 (0,0397)	-0,00837** (0,00404)
Pertumbuhan Penduduk	-0,206 (0,0567)	-0,0237*** (0,00737)	0,165 (0,196)	0,0163 (0,0189)
Unemp	-0,0529 (0,0301)	-0,00609* (0,00357)	-0,0392 (0,0403)	-0,00389 (0,00385)
IPDRBK	-0,233 (0,124)	-0,0269* (0,0146)	-0,511 (0,254)	-0,0507** (0,0231)
IUSAHA	0,0235 (0,0595)	0,00271 (0,00689)	-0,0246 (0,0729)	-0,00244 (0,00718)
Constant	4,935 (1,455)		1,506 (1,918)	
Observations	102	102	102	102
Number of Province	34	34	34	34

Catatan: Semi-robust standard errors in parentheses, *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

Berdasarkan analisis, beberapa faktor diidentifikasi sebagai faktor yang secara signifikan memengaruhi penyerapan belanja daerah. Rasio belanja daerah terhadap pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan, dengan pengaruh marginal sebesar 0,354 poin persentase pada model pertama dan 0,051 poin persentase pada model kedua. Selanjutnya, rasio kemandirian fiskal juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan pada model pertama, dengan pengaruh marginal sebesar 0,0797 poin persentase, meskipun signifikansinya menurun pada model kedua.

Sementara itu, dua variabel kontrol memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Tingkat pengangguran mengurangi probabilitas penyerapan pengeluaran sebesar 0,609 poin persentase pada model pertama. PDB per kapita juga memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada kedua model, yaitu sebesar -2,69 poin persentase pada model pertama dan -5,07 poin persentase pada model kedua. Jumlah bisnis dan Indeks Daya Saing Regional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan pengeluaran pada model ini.

Berdasarkan hasil uji ketahanan model menggunakan pendekatan QMLE pada Tabel 4, model tersebut menghasilkan hasil yang secara umum konsisten dengan estimasi sebelumnya. Variabel derajat desentralisasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas penyerapan pengeluaran, dengan pengaruh marginal sebesar 0,150 poin persentase pada model pertama dan 0,0798 poin

persentase pada model kedua. Rasio pengeluaran terhadap pendapatan juga memiliki pengaruh positif yang signifikan, dengan pengaruh marginal sebesar 0,3534 poin persentase pada kedua model. Demikian pula, rasio independensi fiskal tetap signifikan pada model kedua, dengan pengaruh marginal sebesar 0,0798 poin persentase.

Tabel 4. Model QMLE

Penyerapan Belanja	Coefficient	Marginal Effect	Coefficient	Marginal Effect
Derajat Desentralisasi	0,0150 (0,00493)			
Rasio Kemandirian			0,00803 (0,00385)	0,000798** (0,000364)
Rasio Penerimaan Pajak			-0,0173 (0,0149)	-0,00171 (0,00146)
Rasio Belanja Terhadap Pendapatan			0,0356 (0,00477)	0,00354*** (0,000480)
IDI	0,00778 (0,0139)	0,000892 (0,00161)	0,0309 (0,0227)	0,00307 (0,00213)
IPOPDEN	-0,0664 (0,0379)	-0,00761* (0,00430)	-0,0844 (0,0397)	-0,00838** (0,00400)
Pertumbuhan Penduduk	0,121 (0,151)	0,0139 (0,0179)	0,164 (0,199)	0,0163 (0,0194)
Unemp	-0,0565 (0,0343)	-0,00648 (0,00404)	-0,0392 (0,0391)	-0,00390 (0,00376)
IPDRBK	-0,351 (0,178)	-0,0403* (0,0219)	-0,511 (0,235)	-0,0507** (0,0219)
IUSAHA	-0,0226 (0,0573)	-0,00260 (0,00654)	-0,0246 (0,0724)	-0,00244 (0,00714)
Constant	4,754 (1,461)		1,508 (1,830)	
Observations	102	102	102	102
Number of Province	34	34	34	34

Catatan: Robust standard errors in parentheses, *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

Dalam hal variabel kontrol, PDB per kapita secara konsisten memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada kedua model. Perbedaan hasil muncul untuk variabel kepadatan penduduk, yang dalam estimasi QMLE ini menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan dengan efek marginal masing-masing -0,0076 poin persentase dan -0,0838 poin persentase, sedangkan pada model sebelumnya tidak signifikan. Artinya, variabel IDI, Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, dan Bisnis tetap konstan, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi QMLE dan model Mundlak desentralisasi pendapatan daerah dari sumber internal berkorelasi positif dengan penyerapan pengeluaran karena dampak langsung dari peningkatan sumber daya keuangan terhadap kemampuan suatu daerah untuk membiayai pengeluarannya (Fajriati et al., 2021). Ketika suatu daerah menghasilkan lebih banyak pendapatan secara internal, daerah

tersebut meningkatkan kemandirian keuangan dan kapasitasnya untuk mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional. Hubungan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan publik, karena daerah dengan desentralisasi pendapatan yang lebih besar dapat mengelola anggaran mereka dengan lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Bagian berikut menguraikan mekanisme dan implikasi dari hubungan ini (Rosdiana et al., 2023).

Daerah dengan desentralisasi pendapatan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya keuangan yang dapat mereka gunakan, sehingga memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengeluaran untuk layanan publik dan pengembangan infrastruktur. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa daerah dengan desentralisasi pendapatan yang signifikan dapat membiayai pengeluaran mereka secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kemampuan untuk menghasilkan pendapatan secara lokal memberdayakan daerah untuk melakukan investasi strategis di bidang-bidang yang secara langsung bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mereka, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur (Tirtana et al., 2023).

Daerah dengan desentralisasi pendapatan yang lebih besar cenderung menikmati otonomi fiskal yang lebih besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada transfer pemerintah pusat. Otonomi ini memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan efektif, menyelaraskan pengeluaran dengan prioritas dan kebutuhan lokal (Fahrimal et al., 2024). Kemandirian fiskal juga mendorong daerah untuk mengoptimalkan kegiatan penghasil pendapatan mereka, seperti meningkatkan pengumpulan pajak dan mengembangkan industri lokal, yang selanjutnya meningkatkan kapasitas keuangan mereka (Masfufah & Yuliana, 2023).

Hubungan positif antara desentralisasi pendapatan dan pengeluaran daerah pada hasil regresi menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah didorong untuk menerapkan strategi yang meningkatkan desentralisasi pendapatan, seperti memperbaiki sistem pajak dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Pengelolaan desentralisasi pendapatan yang efektif dapat menghasilkan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan adil, karena daerah dapat berinvestasi dalam proyek jangka panjang yang bermanfaat bagi penduduknya (Eka & Nugraha, 2019).

Kemandirian fiskal daerah dapat berdampak positif pada pengeluaran daerah dengan meningkatkan otonomi keuangan dan kapasitas pengambilan keputusan pemerintah daerah. Kemandirian ini memungkinkan daerah untuk menyelaraskan pengeluaran mereka dengan kebutuhan lokal, memperkuat manajemen anggaran, dan mengurangi ketergantungan mereka pada transfer pemerintah pusat. Kemampuan untuk menghasilkan dan mengelola sumber pendapatan sendiri, seperti pajak dan pungutan daerah, memberdayakan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan dan pertumbuhan ekonomi daerah (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Daerah dengan kemandirian fiskal yang lebih besar dapat menghasilkan pendapatan lokal yang signifikan melalui pajak dan pungutan, yang secara langsung berkontribusi pada otonomi keuangan mereka (Dewantoro, 2022). Kapasitas penghasil pendapatan ini memungkinkan daerah untuk membiayai pengeluaran mereka tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat, sehingga menghasilkan alokasi anggaran yang lebih efisien. Manajemen pendapatan lokal yang efektif meningkatkan kemampuan suatu daerah untuk merencanakan dan melaksanakan anggarannya, memastikan bahwa dana dialokasikan ke area prioritas yang selaras dengan tujuan pembangunan lokal. Hal ini menghasilkan peningkatan penyerapan pengeluaran daerah karena dana digunakan secara lebih strategis.

Meskipun kemandirian fiskal daerah menawarkan banyak manfaat untuk menyerap pengeluaran daerah, penting untuk mempertimbangkan tantangan potensial (Kii et al., 2022). Daerah dengan kemandirian fiskal rendah mungkin kesulitan menghasilkan pendapatan lokal yang cukup, sehingga terus bergantung pada transfer pemerintah pusat dan kapasitas terbatas untuk menyerap pengeluaran secara efektif. Lebih lanjut, perbedaan kemandirian fiskal antar daerah dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, karena daerah yang lebih kaya mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam pembangunan lokal dibandingkan dengan daerah yang kurang makmur. Oleh karena itu, meskipun kemandirian fiskal dapat meningkatkan penyerapan pengeluaran, sangat penting untuk mengatasi perbedaan ini guna memastikan pembangunan daerah yang seimbang dan akses yang adil terhadap sumber daya (Tuwaidan et al., 2024).

Variabel desentralisasi pengeluaran dapat secara positif memengaruhi pengeluaran daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan efisiensi keuangan, dan menyelaraskan pengeluaran publik dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk memiliki otonomi yang lebih besar atas sumber daya keuangan mereka, yang mengarah pada penggunaan dana yang lebih efisien dan efektif. Otonomi ini memungkinkan daerah untuk menyelaraskan pengeluaran mereka dengan prioritas lokal, yang berpotensi menghasilkan hasil ekonomi yang lebih baik dan peningkatan kemandirian keuangan. Bagian-bagian berikut akan membahas aspek-aspek ini secara detail. Desentralisasi pengeluaran telah terbukti secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, otonomi fiskal dan transfer keuangan dari pemerintah pusat sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah (Subhan et al., 2024).

Desentralisasi fiskal telah terbukti meningkatkan efisiensi keuangan regional, dengan efek limpahan spasial yang signifikan. Simetri antara pengeluaran fiskal dan desentralisasi pendapatan sangat penting untuk memaksimalkan efisiensi ini. Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk menentukan prioritas pembangunan mereka dan mengeksplorasi sumber pendanaan, yang menghasilkan peningkatan pendapatan yang dihasilkan secara lokal dan dukungan untuk pembangunan (Dharmawati et al., 2024). Hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pengeluaran pendidikan di negara-negara OECD menunjukkan bahwa

persaingan lokal dapat menyebabkan pengeluaran yang lebih tinggi untuk kebijakan yang terutama disediakan di tingkat lokal.

Meskipun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan penyerapan pengeluaran regional, hal ini bukannya tanpa tantangan. Terdapat risiko meningkatnya kesenjangan regional, karena daerah yang lebih kaya mungkin lebih banyak mendapat manfaat dari desentralisasi, sementara daerah yang lebih miskin tetap bergantung pada transfer pemerintah pusat (Nkoa et al., 2024). Lebih lanjut, efektivitas desentralisasi fiskal dapat terhambat oleh keterbatasan kapasitas manajerial di beberapa daerah, yang dapat mencegah mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan otonomi yang diberikan oleh desentralisasi. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi dapat memiliki efek positif, implementasi dan dukungan yang cermat diperlukan untuk memastikan manfaat yang adil di seluruh daerah.

Selanjutnya variabel populasi juga secara signifikan memengaruhi pengeluaran regional dengan menciptakan berbagai tantangan dan memerlukan penyesuaian fiskal. Penurunan populasi dapat menyebabkan peningkatan biaya per kapita untuk layanan publik karena biaya infrastruktur tetap, memaksa pemerintah untuk menyesuaikan anggaran mereka, seringkali dengan menaikkan pajak atau memangkas pengeluaran modal (Komarek & Wagner, 2019). Lebih lanjut, pergeseran demografis seperti populasi yang menua dapat menggeser prioritas pengeluaran dengan meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan dan kesejahteraan, sementara populasi yang lebih besar berpotensi meningkatkan efisiensi pengeluaran melalui skala ekonomi (Setiawan et al., 2025). Dengan demikian, para pembuat kebijakan harus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi demografis dan ekonomi spesifik setiap wilayah, berinovasi melalui investasi yang tepat sasaran, dan meningkatkan efisiensi untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal dalam menghadapi tren populasi yang berubah (Zhang, 2024).

Tabel 5 menyajikan sintesis temuan utama penelitian yang sekaligus merepresentasikan keseluruhan pembahasan empiris pada bagian sebelumnya. Tabel ini merangkum hubungan antara desentralisasi fiskal, kemandirian fiskal daerah, serta faktor-faktor demografis dan ekonomi terhadap penyerapan belanja daerah. Secara umum, temuan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pendapatan internal dan otonomi fiskal berkontribusi positif terhadap efektivitas penyerapan anggaran, sementara variabel penghambat seperti ketimpangan ekonomi dan keterbatasan kapasitas daerah memerlukan intervensi kebijakan yang tepat. Selain itu, dinamika demografi, khususnya pertumbuhan dan struktur penduduk, turut memengaruhi pola dan efisiensi pengeluaran daerah. Oleh karena itu, tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan hasil, tetapi juga sebagai dasar perumusan implikasi kebijakan yang lebih terarah dan kontekstual.

Penyerapan belanja regional dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor demografis dan ekonomi, di mana peningkatan pada satu metrik saja tidak secara otomatis menjamin hasil yang lebih baik. Di satu sisi, dinamika populasi seperti penurunan populasi dapat menciptakan tantangan fiskal melalui peningkatan biaya per

kapita untuk layanan publik dan tekanan untuk menyesuaikan anggaran (Dahiri & Nasution, 2022). Di sisi lain, PDB yang tinggi tidak selalu berkorelasi positif dengan penyerapan belanja; bahkan dapat memiliki hubungan negatif dengan pangsa belanja kesejahteraan dan hubungan positif dengan belanja saat ini, yang menunjukkan pergeseran prioritas belanja sesuai dengan status ekonomi (S. Widodo, 2021). Oleh karena itu, kunci untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tidak hanya berfokus pada peningkatan *output* ekonomi atau populasi, tetapi lebih pada pendekatan yang menekankan peningkatan manajemen fiskal, efisiensi administrasi, dan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi spesifik setiap wilayah (Syuhada et al., 2023).

Tabel 5 Temuan Utama dan Implikasi Kebijakan

Variabel	Temuan Utama	Implikasi Kebijakan
Desentralisasi Fiskal (Pendapatan & Pengeluaran)	Secara konsisten menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas kinerja penyerapan pengeluaran regional.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajerial Regional untuk memastikan otonomi fiskal akan menghasilkan pengeluaran publik yang efektif (Rosdiana et al., 2023).
Otonomi Fiskal Regional (Kemandirian)	Hal ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan pengeluaran, sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah sendiri .	Mendorong Peningkatan Pendapatan Lokal dari Sumber Sendiri (Pendapatan Asli Daerah) dengan meningkatkan sistem pajak/pembayaran untuk memperkuat otonomi keuangan dan perencanaan anggaran yang lebih baik (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).
Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan	Hal ini memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penyerapan pengeluaran regional.	Menyelaraskan Desentralisasi Pendapatan dan Pengeluaran untuk memaksimalkan efisiensi fiskal dan kemampuan wilayah dalam mendanai prioritas pembangunan lokal (Eka & Nugraha, 2019).
Faktor Penghambat (Variabel Kontrol Negatif)	Variabel-variabel seperti PDB per kapita (di wilayah yang lebih makmur), Tingkat Pengangguran, dan Kepadatan Penduduk ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.	Fokuskan Bantuan dan Transfer yang Terarah (misalnya , melalui kebijakan transfer atau kebijakan kompensasi) untuk mengatasi kompleksitas administratif dan tantangan sosial-ekonomi di wilayah dengan karakteristik tersebut (Masfufah & Yuliana, 2023).
Pertumbuhan Penduduk	Berkontribusi positif terhadap efektivitas pengeluaran.	Sesuaikan Kebijakan Fiskal dengan Tren Demografis dan mempertimbangkan dinamika populasi dalam perencanaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan fiskal (Zhang, 2024).

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, secara konsisten berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja penyerapan belanja daerah di Indonesia. Peningkatan kewenangan fiskal mendorong efektivitas pengelolaan anggaran, memperkuat kapasitas daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Temuan ini diperkuat oleh pengaruh positif dari rasio kemandirian fiskal dan pertumbuhan penduduk, yang menunjukkan pentingnya otonomi dan dinamika demografis dalam mendukung efektivitas belanja. Sebaliknya, faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pengangguran, dan PDRB per kapita justru berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran, menandakan bahwa kompleksitas administratif, tantangan sosial ekonomi, serta pergeseran prioritas pengeluaran di daerah yang lebih sejahtera dapat menjadi penghambat. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan dan manajerial di tingkat daerah, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, serta mendorong pemerataan fiskal antarwilayah guna memastikan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya memberikan otonomi, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas belanja publik dan pembangunan yang inklusif.

Referensi

- Siagian, A., Harmain, H., & Syarvina, W. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(4), 115–128. <https://doi.org/10.61132/JEAP.V1I4.411>
- Boadway, R., & Shah, A. (2009). Fiscal federalism: Principles and practice of multiorder governance. *Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance*, 1–620. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511626883>
- Chandra, Y. (2024). Assessing the Impact of Decentralization on the Quality of Indonesian Democracy. *Jurnal Global & Strategis*, 18(2), 409–430. <https://doi.org/10.20473/JGS.18.2.2024.409-430>
- Cho, D., & Lee, K. W. (2024). Government size and the effectiveness of fiscal policy: the bigger the better? *Macroeconomic Dynamics*, 29. <https://doi.org/10.1017/S1365100524000415>
- Dahiri, & Nasution, M. (2022). Analisis Hubungan Belanja Pemerintah Fungsi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 2(1), 62–73. <https://doi.org/10.22212/JBUDGET.V2I1.51>
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47. <https://doi.org/10.56916/JIMAB.V1I2.174>
- Dharmawati, T., Wa Ode Muhardiana, & Wa Ode Apriusilia Z.A. (2024). The Role of Fiscal Decentralization in Enhancing Regional Financial Independence in

- Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(12), 241–252. <https://doi.org/10.62504/JIMR1107>
- Eka, A. P. B., & Nugraha, N. (2019). *Total Realization of Regional Income and the Implications on Regional Financial Performance in West Java Province 2013-2017*. <https://doi.org/10.2991/ICEBEF-18.2019.7>
- Ewing-Chow, M., & Losari, J. (2015). Multiple Authorisation: The Legal Complexity of Desentralisasi in Indonesia and the Potential Contribution of IIAs in Reducing Confusion. *Indonesia Law Review*, 5(3). <https://doi.org/10.15742/ILREV.V5N3.166>
- Fahrimal, M. H., . N., & Djalil, M. A. (2024). Analysis of Regional Expenditure To Increase The Regional Original Revenue in The District of Aceh Province, Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(1). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/V14-I1/20154>
- Fajriati, M., Zulfatunnisa, Z., Wafa, D. R., Heryaningrum, R. A., & Anwar, S. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. *Wacana Publik*, 15(02), 75–85. <https://doi.org/10.37295/WP.V15I2.71>
- Furceri, D. (2007). Is government expenditure volatility harmful for growth? A cross-country analysis. *Fiscal studies*, 28(1), 103-120. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2007.00049.x>
- Hasanli, A. (2017). Fiscal decentralization and economic growth: A dilemma between theory and empiricism. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 20(3), 77–94. <https://doi.org/10.5782/2223-2621.2017.20.3.77>
- Hayati, J., Pradani, T., & Tirtana, D. (2024). The Moderation Role of Budget Ratcheting: The Relationship Between Fiscal Decentralization and Regional Spending. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 11(2), 80–93. <https://doi.org/10.33019/EQUITY.V11I2.191>
- Huda, N. A., & Sasana, H. (2013). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 233–245. <https://doi.org/10.14710/DJOE.1965>
- Kii, H. E., Harmono, & Sumtaky, M. (2022). The Effect of Regional Taxes, Regional Levies, Balancing Funds, and other Legitimate Regional Revenues on Regional Independence Through Direct Expenditure (Empire Study: District/City Governments in East Nusa Tenggara Province). *European Journal of Business and Management Research*, 7(6), 204–213. <https://doi.org/10.24018/EJBMR.2022.7.6.1719>
- Komarek, T. M., & Wagner, G. A. (2019). Local Fiscal Adjustments from Depopulation: Evidence from the Post-Cold War Defense Contraction. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3410471>
- Lenas, M. N. J., Rahmatia, Zamhuri, M. Y., & Hamrullah. (2025). Revisiting the Linkages of Fiscal Decentralization and Labor Absorption: A Theoretical Perspective. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(6s), 515–524. <https://doi.org/10.64252/MWTYKM97>

- Liu, J., Hu, X., & Tang, H. (2016). Fiscal Decentralization and Regional Financial Efficiency: An Empirical Analysis of Spatial Durbin Model. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/6597138>
- Mahi, B. R., Supriyanti, S. S., Mahi, B., Raksaka, S., & Siti, S. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 7. <https://doi.org/10.21002/jepi.2019.07>
- Malik, S., & Aisyah. (2024). Evaluation of Decentralisation Policy: Impact on Regional Development. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(2), 100–104. <https://doi.org/10.59065/JISSR.V4I2.159>
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World development*, 31(9), 1597-1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
- Masufah, M., & Yuliana, I. (2023). The Effect of Regional Taxes and Regional Retribution on Regional Expenditures with Regional Original Revenues as Intervening Variabels in Indonesia in 2017-2022. *Journal Of Economics, Finance And Management Studies*, 06(08). <https://doi.org/10.47191/JEFMS/V6-I8-08>
- Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi. *Journal of Syntax Literate*, 7(8), 10508. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9120>
- Nkoa, B. E. O., Wangbara, D., & Tchoffo Tameko, G. (2024). Efficiency of local public spending in Cameroon: Does population size matter? *African Development Review*, 36(2), 362–376. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12764>
- Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. *New York*, 1.
- Pal, S., & Wahhaj, Z. (2014a). Fiscal Decentralisation, Local Institutions and Public Goods Provision: Evidence from Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2508889>
- Pandoyo. (2024). The Role of Fiscal Decentralization in Sustainable Local Economic Development. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.61194/IJAT.V2I1.484>
- Park, J. (2022). Fiscal Decentralization and the Composition of Local Government Expenditure: Evidence from South Korea. *Public Finance Review*, 50(1), 62–90. <https://doi.org/10.1177/10911421221093142>
- Park, K. (2023). Central Bank Credibility and Monetary Policy. *International Journal of Central Banking*, 19(2), 145–197. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3306035>
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/JIUBJ.V22I3.2581>
- Puji Agus Kurniawan, & Djuni Farhan. (2023). Analysis Of Effectiveness And Efficiency Of Expenditure Budget Absorption at Universitas Negeri Malang for the 2019-2021 Fiscal Year. *International Journal of Economics and Management Research*, 2(1), 26–38. <https://doi.org/10.55606/IJEMR.V2I1.63>

- Pyun, J. H., & Rhee, D.-E. (2015). Inequality and Fiscal Policy Effectiveness. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2634268>
- Reba, Y. E. (2024). Decentralization of Power: Opportunities and Challenges for Regions. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(10), 2464–2476. <https://doi.org/10.59613/GLOBAL.V2I10.344>
- Richard, K., Muriu, P. W., & Maturu, B. (2017). Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies on Output Stabilization in Developing Countries: Evidence from Rwanda. *International Journal of Economics and Finance*, 10(1), 220. <https://doi.org/10.5539/IJEF.V10N1P220>
- Rosdiana, Setyadi, D., & Rante Langi, C. (2023). Effect of Original Regional Income on Regional Expenditure and Economic Growth in East Kutai Regency Region. *International Journal of Research and Review*, 10(10), 89–93. <https://doi.org/10.52403/IJRR.20231011>
- Saputra, B., Madani, S., & Mahmudi, B. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(2). <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/3766>
- Sasana, H. (2019). Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth. *Economics Development Analysis Journal*, 8(1), 108–119. <https://doi.org/10.15294/EDAJ.V8I1.29879>
- Seifert, J., & Li, H. (2015). Indonesia's Fiscal Decentralization and its Effect on Provincial Public Finances. *Public Finance and Management*, 15(2), 108–129. <https://doi.org/10.1177/152397211501500202>
- Setiawan, T., Myrna, R., Isnawati, N. W., Samith, M. F., & Mughits, M. H. (2025). The environmental dynamics in shaping ecological governance for sustainable development in coastal areas. *Discover Sustainability 2025 6:1*, 6(1), 1–31. <https://doi.org/10.1007/S43621-025-01849-8>
- Setiawan, T., & Samith, M. F. S. (2025). Indonesia's Marine Resources Innovation: Digital Transformation in Blue Economy Policy for Economic Sustainability. *Journal of European Economy*, 24(1), 88–112. <https://doi.org/10.35774/JEE2025.01.088>
- Shah, A. (2023). Fiscal federalism: Federalism's nerve tissue? *Teaching Federalism: Multidimensional Approaches*, 91–103. <https://doi.org/10.4337/9781800885325.00016>
- Siburian, M. E. (2020). Fiscal decentralization and regional income inequality: evidence from Indonesia. *Applied Economics Letters*, 27(17), 1383–1386. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1683139>
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implimentasi Dalam Pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/MI.V18I1.5273>
- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>

- Subhan, Widodo, A.H., & Sujianto, A.E. (2024). Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi di Daerah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3205–3210. <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V5I5.1519>
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Design of Decentralization in Indonesia. *Decentralization and Rural Development in Indonesia*, 27–39. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0_3
- Syuhada, L. O. M. T., Rindayati, W., & Juanda, B. (2023). Keterkaitan Belanja Pemerintah terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 250–262. <https://doi.org/10.29244/JP2WD.2023.7.2.250-262>
- Telaumbanua, Y., & Sirojuzilam, S. (2023). The Influence of Fiscal Decentralization of Economic Growth in Nias Islands. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(10), 3402–3413. <https://doi.org/10.55324/IJOMS.V2I10.592>
- Tirtana, D., Pradani, T., & Hayati, J. (2023). How Does Regional Income Affect Regional Spending? *Journal of International Conference Proceedings*, 6(6), 42–51. <https://doi.org/10.32535/JICP.V6I6.2653>
- Tuwaidan, G. K., Masinambow, V. A. J., & Kawung, G. M. V. (2024). The Influence of Regional Own-Source Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Capital Expenditure on Regional Financial Independence Through Economic Growth in North Sulawesi Province. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(12), 3134–3150. <https://doi.org/10.59141/JISS.V5I12.1525>
- Widodo, A. H., Sujianto, A. E., & Subhan. (2024). Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi di Daerah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5). <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V5I5.1518>
- Widodo, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Variabel Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Provinsi Tahun 2015-2019. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 169–187. <https://doi.org/10.22212/JBUDGET.V6I1.86>
- Zhang, Y. (2024). The Heterogeneous Impact of Changes in the Age Structure of China's Elderly Population on Regional Economic Development. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.2478/AMNS-2024-0690>
- Zhao, R., & He, P. (2024). Government spending efficiency, fiscal decentralization and regional innovation capability: Evidence from China. *Economic Analysis and Policy*, 84, 693–706. <https://doi.org/10.1016/J.EAP.2024.08.033>